

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 8 Juli 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Beritasatu.com	Selasa, 7 Juli 2020	Progres 20,49%, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Beroperasi Desember 2021	Pembangunan Tol Sirip Pekanbaru-Padang pada Padang-Sicincin sepanjang 30,4 km saat ini telah mencapai 20,49 persen. Tol tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang ditargetkan rampung dan beroperasi Desember 2021 mendatang. https://www.beritasatu.com/nasional/653191/progres-2049-tol-padangsicincin-ditargetkan-beroperasi-desember-2021
2	Beritasatu.com	Selasa, 7 Juli 2020	Presiden Minta Pembangunan Tol Trans-Sumatera dan Cismudawu Dipercepat	Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempercepat pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan Cismudawu. https://www.beritasatu.com/nasional/652927/presiden-minta-pembangunan-tol-transsumatera-dan-cismudawu-dipercepat
3	Antaranews.com	Rabu, 8 Juli 2020	Sebanyak 4.500 hunian di Jambi dapat bantuan bedah rumah	Sebanyak 4.500 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi pada tahun 2020 akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang biasa disebut sebagai program bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. https://www.antaranews.com/berita/1597230/sebanyak-4500-hunian-di-jambi-dapat-bantuan-bedah-rumah
4	Antaranews.com	Selasa, 7 Juli 2020	Bupati Aceh Besar: Tol Sibanceh bermanfaat besar untuk sektor ekonomi	Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyatakan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) Seksi IV Indrapuri - Blang Bintang akan memberikan manfaat besar untuk sektor ekonomi di daerah setempat. https://www.antaranews.com/berita/1596510/bupati-aceh-besar-tol-sibanceh-bermanfaat-besar-untuk-sektor-ekonomi
5	Antaranews.com	Selasa, 7 Juli 2020	Pemerintah-Bank Dunia kerja sama proyek pengembangan perkotaan	Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) terkait pendanaan Proyek Pengembangan Perkotaan Nasional (National Urban Development Project NUDP). https://www.antaranews.com/berita/1596326/pemerintah-bank-dunia-kerja-sama-proyek-pengembangan-perkotaan
6	Antaranews.com	Selasa, 7 Juli 2020	Kementerian PUPR: Wabah COVID-19 bisa turunkan kinerja BUMD air minum	Kementerian PUPR melalui Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) menilai berlarutnya pandemi COVID-19 dapat menurunkan kinerja BUMD air minum. https://www.antaranews.com/berita/1596394/kementerian-pupr-wabah-covid-19-bisa-turunkan-kinerja-bumd-air-minum
7	Timesindonesia.com	Selasa, 7 Juli 2020	Kementerian PUPR RI Lakukan Penataan Goa Batu Cermin di KSPN Labuan Bajo	Untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi NTT, Ditjen Cipta Karya melakukan penataan Goa Batu Cermin di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo (KSPN Labuan Bajo) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). https://www.timesindonesia.co.id/read/news/282076/kementerian-pupr-ri-lakukan-penataan-go-batu-cermin-di

				kspn-labuan-bajo
8	Timesindonesia.com	Selasa, 7 Juli 2020	Kementerian PUPR RI: Tol Padang–Sicincin Ditargetkan Beroperasi Desember 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) tengah melaksanakan pembangunan Tol Sirip Pekanbaru-Padang pada Tol Padang–Sicincin sepanjang 30,4 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/282068/kementerian-pupr-ri-tol-padangsicincin-ditargetkan-beroperasi-desember-2021
9	Cnnindonesia.com	Selasa, 7 Juli 2020	Kelarkan Tol Trans Sumatera, Pemerintah Masih Butuh Rp387 T	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah masih membutuhkan dana sebesar Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruh rangkaian jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 kilometer (km). Dana itu mencapai 77,4 persen dari total kebutuhan investasi tol sekitar Rp500 triliun. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707134806-92-521801/kelarkan-tol-trans-sumatera-pemerintah-masih-butuh-rp387-t
10	Medcom.id	Selasa, 7 Juli 2020	Kementerian PUPR-Bank Dunia Garap Pengembangan Perkotaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalin kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) terkait pendanaan Proyek Pengembangan Perkotaan Nasional (National Urban Development Project NUDP). https://www.medcom.id/properti/news-properti/ZkeBOvPK-kementerian-pupr-bank-dunia-garap-pengembangan-perkotaan
11	Indopos.com	Rabu, 8 Juli 2020	Kementerian PUPR Dorong Pembangunan Huntap di Palu	Kementerian PUPR terus mendorong progress pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk masyarakat korban bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak dilaksanakan pembangunannya pada Januari 2020 lalu, saat ini progress pembangunannya sudah mencapai 70 persen dan diharapkan bisa selesai dan dihuni oleh masyarakat pada akhir tahun. https://indopos.co.id/read/2020/07/08/241191/kementeri-an-pupr-dorong-pembangunan-huntap-di-palu/
12	Kompas, halaman 12	Rabu, 8 Juli 2020	Penghuni Rusunawa Tak Perlu Bayar Sewa	Pandemi Covid-19 sudah berdampak pada semua aspek kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk membantu warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya menertibkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020. Pergub itu memberikan relaksasi bagi semua penghuni rumah susun sederhana sewa di DKI selama masa pandemi. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, Selasa (7/7/2020), menjelaskan, Pergub No 61/2020 itu terbit pada 30 Juni lalu.
13	Bisnis Indonesia, halaman 7	Rabu, 8 Juli 2020	Trans-Sumatera perlu Terobosan	Kepala Negara menekankan perlu ada kalkulasi cermat terkait dengan kelayakan finansial dan juga opsi tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek tol terpanjang di Indonesia itu.
14	Bisnis Indonesia, halaman 7	Rabu, 8 Juli 2020	Tapera Diminta Tak Pilih Kasih	Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia menyalurkan pegawai swasta dan pekerja informal tidak mendapatkan prioritas pertama dalam program tabungan perumahan rakyat (Tapera).
15	Media Indonesia, halaman 2	Rabu, 8 Juli 2020	Tol Trans-Sumatra Perlu Tambahan Dana	Pemerintah mencari opsi pendanaan alternatif untuk menutupi kebutuhan dana Rp 387 triliun dalam pembangunan Tol Trans-Sumatera yang akan menghubungkan Bakauheni hingga Banda Aceh.

Judul	Penghuni Rusunawa Tak Perlu Bayar Sewa	Tanggal	Rabu, 8 Juli 2020
Media	Kompas, halaman 12		
Resume	Pandemi Covid-19 sudah berdampak pada semua aspek kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk membantu warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya menertibkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020. Pergub itu memberikan relaksasi bagi semua penghuni rumah susun sederhana sewa di DKI selama masa pandemi. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, Selasa (7/7/2020), menjelaskan, Pergub No 61/2020 itu terbit pada 30 Juni lalu.		

DAMPAK PANDEMI

Penghuni Rusunawa Tak Perlu Bayar Sewa

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 sudah berdampak pada semua aspek kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk membantu warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020. Pergub itu memberikan relaksasi bagi semua penghuni rumah susun sederhana sewa di DKI selama masa pandemi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, Selasa (7/7/2020), menjelaskan, Pergub No 61/2020 itu terbit pada 30 Juni lalu. Pergub mengatur pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional Covid-19. Artinya, setiap penghuni rumah susun di DKI tidak perlu membayar sewa selama masa pandemi Covid-19.

Tentang pemberian keringanan itu, dalam Pasal 2 dise-

butkan, keringanan diberikan mulai 13 April 2020. Pemberian keringanan dilakukan secara otomatis melalui sistem.

Ahmad Fawzy, Kepala Subbagian Keuangan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Jatinegara Kaum, menjelaskan, untuk pembebasan sewa rumah susun itu sudah dijelaskan dalam pertemuan daring antara dinas dan pengelola rusun. Adapun pembebasan retribusi itu adalah pembebasan untuk sewa unit rusun dan ruko saja.

Para penghuni yang mendapat keringanan adalah para warga yang terkena program relokasi dan para penghuni umum. Sementara untuk retribusi air dan listrik, para penghuni tetap harus membayar.

Tidak berlaku surut

Yang masih menjadi pertanyaannya, lanjut Fawzy, adalah meski dalam Pasal 2 pergub disebutkan pembebasan dimulai April, para penghuni sudah membayar sewa untuk April,

Mei, Juni, dan sebagian pada Juli 2020 ini.

Pergub baru terbit pada 30 Juni, sementara tagihan sewa melalui sistem ditagih tanggal 1-20 setiap bulan. Untuk itu, pihak dinas mesti memberikan kejelasan. Pembebasan sewa rumah susun itu sebetulnya dimulai kapan dan bagaimana mekanisme untuk uang sewa yang sudah dibayarkan.

Sarjoko melanjutkan, untuk pembebasan sewa itu dipastikan tidak berlaku surut. Artinya, untuk penghuni rusun yang sudah terlanjur membayar sewa bulan April, Mei, Juni, dan sebagian Juli, tidak akan ada pengembalian uang sewa.

Uang yang telah dibayarkan akan diperhitungkan dengan tunggakan yang dimiliki atau dikompensasikan untuk pembayaran bulan selanjutnya setelah masa pembebasan dicabut. Atau saat Presiden mencabut keputusan presiden tentang status pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

"Detailnya sedang dirumuskan. Yang pasti pembebasan hanya retribusi sewa, tidak termasuk biaya pemakaian air dan listrik," kata Sarjoko.

Sosialisasi

DPRKP, lanjut Sarjoko, juga tengah menyiapkan teknis pelaksanaan sebagai pedoman bagi para kepala unit pengelola rumah susun untuk mengimplementasikan pergub tersebut.

Selanjutnya, pihak dinas dan unit pengelola rusun segera menyosialisasikan hal itu kepada para penghuni rusun. Di seluruh Jakarta, data per akhir Juni 2020 terdapat 24.916 unit rusunawa yang tersebar di 32 lokasi.

Dari jumlah itu, unit terisi sebanyak 18.239 unit dan dihuni oleh 18.427 keluarga atau sebanyak 65.913 jiwa. Setiap bulan, dana terhimpun dari uang sewa semua rumah susun itu mencapai Rp 7,5 miliar.

(HLN)

Judul	Trans-Sumatera perlu Terobosan	Tanggal	Rabu, 8 Juli 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 7		
Resume	Kepala Negara menekankan perlu ada kalkulasi cermat terkait dengan kelayakan finansial dan juga opsi tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek tol terpanjang di Indonesia itu.		

| PENDANAAN JALAN TOL |

TRANS-SUMATRA PERLU TEROBOSAN

Bisnis, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta ada terobosan sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai kelanjutan proyek jalan tol Trans-Sumatra sepanjang 2.878 kilometer.

Arif Gunawan & Muhammad Khadafi
redaksi@bisnis.com

Kepala Negara menekankan perlu ada kalkulasi cermat terkait dengan kelayakan finansial dan juga opsi tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek tol terpanjang di Indonesia itu.

"Saya minta ada terobosan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN [penyertaan modal negara] dan juga tidak tergantung pada APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara]," katanya saat membuka rapat terbatas percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7).

Saat ini, Presiden menyatakan bahwa PT Utama Karya (Persero) masih membutuhkan tambahan dana Rp387 triliun untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan ruas tol Trans-Sumatra hingga 2024.

Total kebutuhan anggaran untuk seluruh ruas Tol Trans-Sumatra adalah Rp500 triliun. Dana yang sudah tersedia antara lain dari pinjaman perbankan sebesar Rp72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp21,6 triliun dan PMN sebesar Rp19,6 triliun.

Nilai pendanaan yang sudah terpenuhi baru mencapai Rp90 triliun, dengan pemenuhan Rp55 triliun ekuitas dan Rp35 triliun berupa pinjaman. Dengan kondisi itu, kebutuhan total pendanaan masih mencapai Rp387 triliun hingga proyek tersebut rampung seluruhnya.

Presiden Jokowi menegaskan percepatan pembangunan tol Trans-Sumatra sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatra.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan proyek pembangunan jalan tol Trans-Sumatra rampung pada 2024.

pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan 1.194 kilometer (km) yang masih dalam proses konstruksi dan 1.291 km yang masih dalam tahap persiapan. "Jadi total panjang 2.800-an [2.878 km], yang sudah operasi 393 kilometer, yang *under construction* 1.194 kilometer dan sedang persiapan 1.291 kilometer," kata Basuki.

OPSI PENDANAAN

Dia menambahkan tol tersebut memiliki koridor utama dan jalur pendukung. Koridor utama terbentang sepanjang 1.974 km dari pelabuhan Bakauheni, Lampung hingga Banda Aceh.

Untuk jalur pendukung sepanjang 904 km di antaranya adalah jalan tol Bengkulu—Palembang, Padang—Pekanbaru, dan Sibolga—Medan.

Basuki menyatakan masih mencari opsi pendanaan alternatif untuk menutupi kebutuhan dana Rp387 triliun dalam pembangunan Tol Trans-Sumatra yang akan menghubungkan Bakauheni hingga Banda Aceh.

Basuki menambahkan Presiden telah memerintahkan beberapa kementerian untuk mencari opsi terbaik agar pendanaan tol sepanjang 2.878 km itu terpenuhi. "Apakah akan dikeluarkan *bond* [obligasi] jangka panjang? Itu pasti dengan jaminan pemerintah," ujarnya.

SEVP Sekretaris Perusahaan Utama Karya Muhammad Fauzan menyatakan butuh dukungan pembiayaan alternatif guna percepatan pembangunan jalan tol Trans-Sumatra.

"Kami masih tetap membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal sumber-sumber pembiayaan alternatif yang memerlukan jaminan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Perbankan, dan Lembaga Keuangan lainnya," ujarnya.

Saat ini, Trans-Sumatra menggunakan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber mulai dari PMN tunai dari pemerintah, sindikasi perbankan, dukungan Konstruksi, hingga



Jalan tol Trans-Sumatra sepanjang 2.878 kilometer yang merupakan proyek strategis nasional digadang-gadang menjadi akses utama untuk mengefisienkan waktu tempuh di Pulau Sumatra. Pembangunan jalan tol itu juga diharapkan memberikan *multiplier effect* terhadap produk domestik bruto hingga 2 - 3 kali lipat. Sayangnya, proyek prioritas itu masih terkendala pendanaan. Secara total kebutuhan pendanaan tol Trans-Sumatra mencapai Rp500 triliun tetapi dana yang tersedia hanya Rp113 triliun dengan perincian dari perbankan Rp72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp21,6 triliun, dan PMN Rp19,6 triliun.

Jalan Tol Trans-Sumatra yang Beroperasi Mulai 2020

Sumber: BPJT
Bisnis/Petria Cahya Pratiwi

Ruas Tol	Panjang	BUJT	Konstruksi Tuntas/Beroperasi
Tol Kuala Tanjung—Tebtingting—Parapat (Seksi 1 & 3)	50,4 kilometer	PT Utama Marga Waksita	Des-20
Sigli-Banda Aceh	74 kilometer	PT Utama Karya	Hingga Desember 2020
Medan-Binjai Seksi 1 (Simpang Susun Helvetia-Simpang Susun Tanjung Mulia)	6,27 kilometer	PT Utama Karya	Hingga Desember 2020
Pekanbaru-Dumai	131,4 kilometer	PT Utama Karya	Hingga Desember 2020
Padang-Pekanbaru Seksi 1 Padang-Sicincin	30,4 kilometer	PT Utama Karya	Hingga Desember 2020
Tol Kayuagung-Palembang-Betung Seksi 2 dan Seksi 3 (Jakabaring-Betung)	69,19 kilometer	PT Utama Karya	Hingga Desember 2020

Judul	Tapera Diminta Tak Pilih Kasih	Tanggal	Rabu, 8 Juli 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 7		
Resume	Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia menyayangkan pegawai swasta dan pekerja informal tidak mendapatkan prioritas pertama dalam program tabungan perumahan rakyat (Tapera).		

| PEMBIAYAAN PERUMAHAN |

Tapera Diminta Tak Pilih Kasih

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia menyayangkan pegawai swasta dan pekerja informal tidak mendapatkan prioritas pertama dalam program tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pegawai swasta dan pekerja informal baru bisa mendapatkan rumah dalam program Tapera pada 2027. Dia menilai keputusan itu sangat lambat karena banyak masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan rumah dan kesulitan memproses kredit pemilikan rumah (KPR).

Dalam pelaksanaan program Tapera, aparat sipil negara (ASN) dimulai 2021, sedangkan TNI Polri, BUMN dan BUMD pada 2022. Khusus masyarakat pekerja maksimal 7 tahun berikutnya. "Menurut saya itu sangat lambat dan lama, negara juga harus memikirkan subsidi jangka waktu tersebut," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa (7/7).

Dia mempertanyakan alasan Badan Penyelenggara (BP)

Tapera memprioritaskan ASN, TNI & Polri, BUMN dan BUMD terdaftar dalam program iuran tersebut.

Junaidi menilai masyarakat MBR lebih membutuhkan program tersebut. Namun, dia optimistis Tapera bisa menjadi solusi bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan agar lebih mudah mendapatkan rumah sekaligus solusi bagi tingginya *backlog* perumahan di Indonesia. "Kehadiran Tapera ini mungkin salah satu solusi untuk mengurangi subsidi, kekuatannya sangat dahsyat menurut kita," katanya. *(Yanita Petriella)*

Judul	Tol Trans-Sumatra Perlu Tambahan Dana	Tanggal	Rabu, 8 Juli 2020
Media	Media Indonesia, halaman 2		
Resume	Pemerintah mencari opsi pendanaan alternatif untuk menutupi kebutuhan dana Rp 387 triliun dalam pembangunan Tol Trans-Sumatera yang akan menghubungkan Bakauheni hingga Banda Aceh.		

Tol Trans-Sumatra Perlu Tambahan Dana

PEMERINTAH mencari opsi pendanaan alternatif untuk menutupi kebutuhan dana Rp387 triliun dalam pembangunan Tol Trans-Sumatra yang akan menghubungkan Bakauheni hingga Banda Aceh.

Pembangunan infrastruktur, terutama tol, dinilai sangat penting untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.

"Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya. Cari juga opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini," ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas bertopik Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans-Sumatra dan Tol Cisumdawu, di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Dari total rancangan 2.878 kilometer, Tol Trans-Sumatera yang sudah terbangun baru 393 km dan yang dalam pengerjaan sepanjang 1.194 km. Proyeksi pemerintah, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp500 triliun, tetapi baru terkumpul Rp113 triliun yang berasal dari dukungan pemerintah, komitmen perbankan, serta penyertaan modal negara ke PT Hutama Karya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari opsi pendanaan terbaik.

"Apakah akan dikeluarkan *bond* jangka panjang dengan jaminan pemerintah, itu sedang dibicarakan," ucap Basuki.

Pembebasan lahan

Jokowi kemarin juga menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta Menkeu terkait percepatan pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Ia mengatakan, hingga sekarang, proses pembebasan lahan masih terhambat.

"Peraturan teknis pelaksana di Kementerian ATR maupun di Kementerian Keuangan belum lengkap. Saya minta segera diselesaikan. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut Bandara Kertajati," ujar Jokowi.

Tol Cisumdawu memiliki panjang 61,70 kilometer. "Pembangunan Tol Cisumdawu saat ini mencapai 81,6% konstruksi, sedangkan pembebasan lahan sudah selesai 91,23%. Targetnya operasional September 2021," ungkap Menteri Basuki. (Pra/Ant/X-11)